

Motivasi Australia Menerapkan Kebijakan Sekuritisasi terhadap *Irregular Maritime Arrivals* (IMA) Tahun 2001-2008

Oleh:

Elya Tanzila¹

(elyatanzila@gmail.com)

Pembimbing : Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

Bibliografi : 14 Jurnal dan/atau *Working Papers*, 25 Buku, 12 Dokumen dan Laporan Resmi, 13 Situs Web

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research explain about Austrlia's motive implemented securitization policy toward Irregular Maritime Arrivals. For many years, the number of Irregular Maritime Arrivals have been increased in Australia. This research is aimed to explain the reasons of Australia implemented those policies to against Irregular Maritime Arrivals which known as Pacific Solution.

This reasearch theoretically has built with neo-realism perspective on International Relations and supported by securitization theories, and also the concept of non-traditional security. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative explanation methods. Scope of this research is Australia policy towards Irregular maritime Arrivals in the year of 2001 until 2008.

This result shows that the reasons of Australia implementated Pacific Solution are Australia worried about people smuggling, the issue of Islamophobia , and various acts of criminality arising from Irregular Maritime Arrivals.

Keywords : *Irregular Maritime Arrivals Securitization, non-traditional security, people smuggling, Islamophobia, Pacific Solution.*

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2011

I. Pendahuluan

Penelitian ini beranjak dari suatu fenomena migrasi internasional yang marak terjadi di dunia. Sebenarnya fenomena migrasi internasional sudah lama terjadi, namun setelah perang dunia II, dunia internasional baru mulai mendapat perhatian serius dari dunia internasional setelah berakhirnya perang dunia ke II yang ditandai dengan dibentuknya *United Nations High Commissioner of Refugee* pada tanggal 14 Desember 1950².

Motif migrasi internasional selama ini disebabkan oleh faktor pendorong dari negara asal dan faktor penarik dari negara tujuan. Faktor pendorong atau *push factor* seperti perang, diskriminasi, maupun bencana alam kemudian menyebabkan banyaknya warga negara yang secara terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan stabil di negara lain. Demikian halnya dengan faktor penarik dari negara tujuan atau *pull factor* yang kemudian memunculkan keinginan warga negara untuk menuju negara tujuan yang relatif lebih maju dan berkembang demi mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik³.

Australia sebagai negara yang stabil secara politik maupun ekonomi, merupakan negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara. Secara garis besar, terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu kemudian

disebut dengan *boat people* atau manusia perahu⁴.

Terminologi *boat people* sebenarnya merujuk kepada pencari suaka atau *asylum seeker* yang datang menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh suaka di Australia dan menjadi subjek pemrosesan lepas pantai oleh otoritas Australia di pulau-pulau yang berada di luar teritori negara tersebut⁵. Pemerintah Australia melalui *Department Immigration and Citizenship* (DIAC) memutuskan bahwa keberadaan pencari suaka yang datang menggunakan perahu tersebut dianggap sebagai imigran ilegal dan selanjutnya disebut sebagai *Irregular Maritime Arrivals* (IMA)⁶.

Perdebatan mengenai *asylum seekers*, khususnya ketika mengarah kepada manusia perahu atau *boat people*, selalu dikarakteristikan sebagai permasalahan yang penuh misinterpretasi di Australia. Keberadaan pencari suaka atau *asylum seeker* yang datang dengan menggunakan perahu dianggap sebagai sesuatu hal yang ilegal oleh pemerintah Australia. Pengertian *asylum seeker* sendiri sebenarnya adalah “someone who is seeking international protection but whose claim for refugee status has not yet been determined”⁷.

⁴Jannet Phillips and Harriet Spinks. 2013. *Boat arrivals in Australia since 1976*. Parliament of Australia, Departement of Parliamentary Service. diakses dari

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2011-2012/BoatArrivals diakses pada 10 Maret 2014

⁵*Ibid.*,

⁶Anonim. “Immigration detention statistics summary”. *Department Immigration and Citizenship*. <http://www.immi.gov.au/managing-australiasborders/detention/facilities/about/>, diakses pada 10 Maret 2014

⁷Julia Gillard dan Bowen, Chris. “Transcript of joint press conference”. *Parliament Australia*. <http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22chamber%2Fhansard%2F3e4e9532-bf3c-4623-bc6b-c0e926ad7cec%2F0116%22> diakses pada 10 Maret 2014

²UNHCR, The UN Refugee Agency. <http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr> diakses pada 10 Maret 2014

³Anonim. “Migration: Why?”. *World Savvy Monitor*. http://worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=430&Itemid=810 diakses pada 10 Maret 2014

Sedangkan pengertian dari imigran ilegal adalah "people who enter a country without meeting the legal requirements for entry (without a valid visa, for example)". Para pencari suaka dengan perahu ini dianggap ilegal oleh pemerintah Australia dikarenakan tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen resmi yang menunjukkan tujuan kedatangannya ke Australia.

Hukum Australia kemudian mengklasifikasikan kedatangan para pencari suaka tersebut dengan istilah 'unlawful non-citizens', sedangkan pemerintah memberikan istilah terhadap subjek tersebut dengan *Irregular Maritime Arrivals*. Dalam menghadapi arus kedatangan manusia perahu, pemerintah Australia membuat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menghalangi akses masuk para imigran yang dianggap ilegal tersebut. Beberapa kebijakan tersebut menjunjung tinggi prinsip "no advantage" dimana pemerintah ingin menyampaikan pesan bahwa perjalanan membahayakan yang ditempuh para pencari suaka dengan mengarungi lautan dengan segala resikonya adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dikarenakan pemerintah tidak akan menyediakan hak-hak sebagaimana yang seharusnya didapatkan oleh para pencari suaka dan pengungsi.⁸

Menanggapi fenomena tersebut, John Howard sebagai Perdana Menteri saat itu cenderung untuk menutup perbatasannya dari gelombang kedatangan pencari suaka dengan memberlakukan beberapa kebijakan yang bersifat sekuritisasi terhadap IMA. Adapun beberapa kebijakan yang diambil yaitu seperti pemberian mandat kepada Angkatan Laut Australia untuk menghalau

IMA, mengadakan kerjasama dengan beberapa negara dunia ketiga untuk membangun pusat penahanan guna memproses status para pencari suaka serta penghapusan beberapa zona migrasi Australia.

Latar belakang di atas menunjukkan bahwa pemerintah Australia telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dengan memberikan kebijakan yang bersifat 'punitive' terhadap pencari suaka yang datang dengan menggunakan perahu. Pemerintah Australia sebagai pemegang otoritas tertinggi tentunya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Australia tentunya memiliki beberapa alasan mengapa mengambil suatu kebijakan yang cukup berat terhadap IMA. Penelitian ini akan menitikberatkan untuk menjawab pertanyaan mengenai mengapa Australia merasa perlu untuk melakukan sekuritisasi terhadap para IMA yang berkeinginan untuk memasuki wilayah teritorial Australia.

Kerangka Teori

Penulis menggunakan kerangka teori yang beranjak pada perspektif neo-realisme. Munculnya neo realisme pada dasarnya merupakan bentuk respon terhadap perkembangan dunia internasional yang memunculkan fenomena dimana peran aktor negara semakin berkurang tergantikan oleh peran aktor non negara. atau dengan kata lain, neo realisme mengkritik pendapat realisme yang menganggap negara adalah satu-satunya aktor dalam studi hubungan internasional.⁹ Selain itu, neo-realisme mengembangkan konsep keamanan menjadi keamanan non-tradisional.

Penelitian ini dibangun atas empat

⁸Michelle Grattan. "Bowen policy to deter boats laden with risks". *the Age*.
<http://www.theage.com.au/opinion/politics/bowen-policy-to-deter-boats-laden-with-risks-20121122-29stn.html>, diakses pada 15 September 2014

⁹ Scott Burchill, et al., *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Bandung: Nusa Media, hal. 113

pondasi utama, yaitu perspektif neo-realisme dengan level analisa kelompok yang didukung oleh teori sekuritisasi dan konsep keamanan non-tradisional.

II. Isi

Peningkatan jumlah kedatangan *Irregular Maritime Arrivals* (IMA) tiap tahunnya sejak pertama kali IMA muncul di Australia membuahkan polemik tersendiri bagi keamanan negara tersebut. Keterbukaan Australia menerima kedatangan manusia perahu di tahun 1976 menumbuhkan peluang bagi para calon manusia perahu selanjutnya untuk dapat disambut ramah di tanah Australia. Sehingga, pada tahun-tahun berikutnya, jumlah manusia perahu seakan tak terbendung lagi. Lonjakan tajam kedatangan manusia perahu terjadi pada tiga tahun terakhir sebelum diberlakukannya kebijakan sekuritisasi yaitu dari tahun 1999-2001, totalnya adalah 12.176 orang, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang jumlah manusia perahu per-tahun-nya masih dalam skala ratusan. Australia mulai merasa khawatir akan keamanan negaranya yang akan ditimbulkan oleh gelombang manusia perahu tersebut.

Penulis akan menjabarkan alasan-alasan kekhawatiran Australia terhadap *Irregular Maritime Arrivals* (IMA) yang bagi Australia dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat dan wilayah Australia itu sendiri. Dalam hal ini penulis mengkorelasikan berbagai fenomena-fenomena baik yang terjadi di wilayah Australia itu sendiri maupun di dunia internasional yang dapat menjadi beberapa alasan kuat Australia mengambil suatu kebijakan yang protektif terhadap gelombang *Irregular Maritime Arrivals* yang terus menerus mencoba memasuki wilayah Australia.

The Pacific Solutions

Australia mengenalkan kebijakan khusus untuk menekan jumlah *Irregular Maritime Arrivals* menuju Australia yang tiap tahun semakin bertambah jumlahnya. kebijakan sekuritisasi tersebut dikenal dengan nama “*The Pacific Solutions*”.¹⁰ Kebijakan ini berada di bawah kementerian imigrasi Australia yang dipimpin oleh Philip Ruddock.

Kebijakan “*The Pacific Solutions*” menerapkan beberapa langkah-langkah yang diambil Australia guna menekan bahkan menghalangi *Irregular Maritime Arrivals*. Langkah-langkah yang pemerintah Australia terapkan dalam menangani fenomena tersebut yaitu dengan menghilangkan zona migrasi di wilayah Australia, menggunakan perangkat militer untuk menghalau *Irregular Maritime Arrivals*, dan yang terakhir adalah dengan membangun kerjasama dengan negara dunia ketiga di Pasifik Selatan, yaitu Nauru dan Papua New Guenia dalam membentuk pusat penahanan.

Penggunaan zona migrasi atau pusat detensi di Australia memiliki sejarah yang cukup panjang. Undang-Undang Australia sebelum tahun 1992, mengizinkan penahanan orang-orang tertentu yang berada di wilayah Australia tanpa memiliki visa tidak diwajibkan.

Pemerintah Australia pada tahun 1999 kemudian, memperkenalkan undang-undang yang meningkatkan hukuman terhadap pelanggaran penyelundupan manusia dan mencegah komisi ini mengirim informasi mengenai hak mendapat bantuan hukum bagi tahanan. Namun pemerintah tetap tidak mengubah hukum berkaitan dengan

¹⁰ Janet Phillips. 2012. Parliament of Australia, Department of Parliamentary Service. *The Pacific Solutions Revisited: a Statistical guide to the Asylum Seekers Caseloads in Nauru and Manus Island*.

unlawful-non citizen. Perubahan besar terjadi pada tahun 2001, ketika pemerintah harus menghadapi tragedi yang dikenal dengan sebutan ‘Krisis Tampa’. Beberapa kebijakan dirumuskan oleh pemerintah Australia, termasuk mengenai zona migrasi atau pusat detensi.

Salah satu cara Australia untuk memproteksi keamanan perbatasan dan kedaulatan negaranya adalah dengan menghilangkan zona migrasi di wilayah Australia. Australia melakukan beberapa amandemen terhadap *Migration Act 1958*, dengan mengurangi hak-hak pengungsi dan merubah zona migrasi yang awalnya berada di pulau-pulau kecil Australia menjadi di luar teritorial Australia, pemerintah Australia berharap kedatangan *Irregular Maritime Arrivals* yang menuju wilayah Australia akan berkurang.

Australia melakukan amandemen tersebut pada tanggal 26 September 2001. Hasil amandemen tersebut adalah bahwa pengungsi yang mendarat di pulau-pulau ini (Pulau Christmast, Pulau Ashmore, Cartier, dan Cocos) tidak diperbolehkan untuk mengajukan aplikasi visa, termasuk permintaan suaka. Satu-satunya kesempatan untuk tetap bisa berada di wilayah Australia ialah dengan mendapat mandat khusus dari menteri imigrasi, yang keputusannya tidak dapat ditinjau ulang.¹¹

Kebijakan pemerintah Australia yang lain yaitu dengan menggunakan perangkat militer untuk menghalau kedatangan para *Irregular Maritime Arrivals*.

Penanganan perbatasan maritim di Australia secara umum dikenal dengan

pendekatan “*Muddling Through*”¹² dimana fokus pengamanan dilakukan terhadap krisis tertentu yang terjadi pada saat itu. Perhatian utama dari pengawasan maritim pada tahun 1960an fokus pada masalah *illegal fishing*. Perhatian utama kemudian berubah kepada imigran ilegal pada tahun 1970an berkenaan dengan manusia perahu asal Vietnam. Tahun 1980an, perhatian utama pengawasan maritim fokus pada masalah perdagangan narkoba. Perhatian utama pengawasan maritim Australia akhirnya kembali fokus pada *boat people* atau *Irregular Maritime Arrivals* pada tahun 2001 terkait krisis Tampa sebelum kemudian ancaman teroris maritim menjadi perhatian utama.¹³

Angkatan pertahanan Australia dimulai dengan Operasi Relex untuk menghalau kapal yang membawa *Irregular Maritime Arrivals*.¹⁴ Antara bulan September hingga Desember 2001, 13 kapal yang membawa *Irregular Maritime Arrivals* mencoba memasuki zona migrasi Australia namun berakhir gagal. Empat buah kapal dicegat oleh angkatan laut Australia dan terpaksa kembali ke Indonesia, lima kapal ditahan kemudian segera dikirim ke Nauru, dua dikirim ke pulau Christmast kemudian dialihkan ke Nauru, dan terakhir adalah SIEV X, yang tenggelam.

Mengamankan maritim Australia membutuhkan berbagai kemampuan untuk pengawasan, patroli dan respon kapal, serta

¹¹ Alexander J. Wood, The Pacific Solution: Refugees Unwelcome in Australia, terdapat dalam < <http://www.wcl.american.edu/hrbrief/09/3wood.pdf> > diakses pada 10 Januari 2015

¹² Sam Bateman. *Securing Australia's Maritime Approaches*. Juournal Security Challenges, Vol.3 Num.3. Hal. 110

¹³ Anthony Bergin and Sam Bateman, 2005, *Future unknown: The terrorist threat to Australian maritime security*, Canberra, Australian Strategic Policy Institute, Hal 111

¹⁴ Refugee Council. *Timeline of Major Events in the History of Australia's Refugee and Humanitarian Program*. Dalam <<http://www.refugeecouncil.org.au/fact-sheets/australias-refugee-and-humanitarian-program/timeline/>> diakses pada 10 Januari 2015

pesawat terbang dan sistem. Kapal dan pesawat, keduanya digunakan untuk melakukan pengawasan atau patroli terhadap wilayah maritim Australia.

Kebijakan sekuritisasi Australia selain memaksimalkan peran militer dan menghapus zona migrasi di wilayah Australia guna menekan jumlah *Irregular Maritime Arrivals* adalah dengan membentuk kerjasama dengan negara dunia ketiga yang berada di kawasan Pasifik Selatan. Inti dari kerjasama ini adalah untuk membangun pusat detensi atau penahan bagi *Irregular Maritime Arrivals* dalam proses mendapatkan status sebagai pengungsi. Australia bekerjasama dengan negara Nauru dan Papua New Guenia (PNG) dalam membangun pusat detensi.¹⁵

Kekhawatiran Australia terhadap Ancaman oleh keberadaan IMA

Peningkatan jumlah kedatangan *Irregular Maritime Arrivals* (IMA) tiap tahunnya sejak pertama kali IMA muncul di Australia membuahkan polemik tersendiri bagi keamanan negara tersebut. Keterbukaan Australia menerima kedatangan manusia perahu di tahun 1976 menumbuhkan peluang bagi para calon manusia perahu selanjutnya untuk dapat disambut ramah di tanah Australia. Sehingga, pada tahun-tahun berikutnya, jumlah manusia perahu seakan tak terbendung lagi. Lonjakan tajam kedatangan manusia perahu terjadi pada tiga tahun terakhir sebelum diberlakukannya kebijakan sekuritisasi yaitu dari tahun 1999-2001, totalnya adalah 12.176 orang, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang jumlah manusia perahu per-tahun-nya masih dalam skala ratusan. Australia mulai merasa khawatir akan keamanan negaranya yang akan ditimbulkan oleh gelombang manusia perahu tersebut.

Penulis akan menjabarkan alasan-alasan kekhawatiran Australia terhadap *Irregular Maritime Arrivals* (IMA) yang bagi Australia dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat dan wilayah Australia itu sendiri. Dalam hal ini penulis mengkorelasikan berbagai fenomena-fenomena baik yang terjadi di wilayah Australia itu sendiri maupun di dunia internasional yang dapat menjadi beberapa alasan kuat Australia mengambil suatu kebijakan yang protektif terhadap gelombang *Irregular Maritime Arrivals* yang terus menerus mencoba memasuki wilayah Australia.

Australia mengambil kebijakan sekuritisasi terhadap *Irregular Maritime Arrivals* dikarenakan Australia tidak ingin keamanan negaranya terancam. Adapun kekhawatiran Australia tersebut berupa persepsi yang negatif terhadap *Irregular Maritime Arrivals* seperti anggapan bahwa *Irregular Maritime Arrivals* adalah imigran ilegal yang identik dengan kriminalitas, kekhawatiran Australia akan adanya penyelundupan manusia, dan yang terakhir adalah Islamophobia yang dirasakan oleh masyarakat Australia.

***Irregular Maritime Arrivals* dan Kriminalitas**

Pemerintah Australia pada masa John Howard, dalam memandang gelombang kedatangan *Irregular Maritime Arrivals* tidak lebih sebagai suatu tindakan ilegal yang identik dengan kriminalitas.

Menurut otoritas Australia, para pencari suaka melalui perahu ini sudah dari awal diidentifikasi sebagai ilegal dan secara sengaja melanggar kedaulatan wilayah Australia. Perahu ini diidentifikasi sebagai SIEV atau *Suspected Illegal Entry Vessel*.¹⁶

¹⁵ Philips, 2012, *Op.Cit.*,

¹⁶ Tony Kevin, 2004, *A Certain Maritime Incident – The Sinking of SIEV-X*, Carlton North, Scribe Publications, Hal. 69

Kedatangan *Irregullar Maritime Arrivals* dengan menggunakan perahu menuju Australia juga mengindikasikan beberapa aktivitas lain yang berhubungan erat dengan tindak kriminalitas. Letak geografis Australia yang berdekatan dengan benua Asia membuka celah berbagai tindak kriminalitas yang dilakukan oleh berbagai organisasi kejahatan, terutama *Chinese Organized Gang*-organisasi kejahatan terbesar di Australia.¹⁷

Chinese Organised Gang di Australia tidak memiliki struktur hirarki yang jelas, siapa pemimpinnya, serta berapa banyak anggota atau pekerjanya. Walaupun begitu, perdagangan narkoba dari Asia Tenggara ke Australia merupakan operasi yang canggih dan fleksibel.¹⁸

Penyelundupan manusia, perdagangan manusia, perdagangan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah beberapa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal Cina tersebut. Pengangkutan narkoba biasanya dikombinasikan dengan perdagangan manusia untuk menekan biaya transportasi. Jalur maritim adalah jalur utama karena mereka dapat menghindari deteksi, sementara jalur udara harus melewati proses yang lebih rumit.¹⁹

Kebanyakan *Irregullar maritime Arrivals* (IMA) adalah orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah, dan tidak memiliki kecakapan. Akibatnya, menjadi pekerja dalam mendistribusikan narkoba oleh *Chinese Organized Gang* adalah salah satu pilihan untuk bertahan hidup di Australia kedepannya.

Satu kejahatan membawa pada kejahatan yang lain. Istilah tersebut sangat tepat untuk menjelaskan fenomena kejahatan

atau tindak kriminalitas di Australia. Tindak perdagangan narkoba yang sukses diperdagangkan di Australia, membawa sindikat kejahatan mengembangkan tindak kriminalitas lain. Pencucian uang adalah salah satu kelanjutan dari tindak perdagangan narkoba yang menuai sukses di negeri Australia.

Pencucian uang, telah meningkat dalam hubungannya dengan kasus perdagangan narkoba dan perdagangan manusia ke Australia. Polisi federal Australia memperkirakan bahwa ada sekitar 1,7 juta US dollar hingga 6,6 juta per tahun yang dicuci dari hasil keuntungan perdagangan heroin.²⁰ Operasi pencucian semakin dimudahkan dengan adanya sistem komunikasi yang cepat untuk mentransfer dana dari dan ke luar bank Australia. Selain menggunakan kecanggihan sistem perbankan, sindikat kejahatan juga menggunakan kurir untuk membawa uang tunai dan memindahkan uang melalui rekening internasional atas nama keluarga.²¹ Kebanyakan kurir tersebut adalah *Irregullar Maritime Arrivals* yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup di Australia.

Tidak ada presentase atau data statistik yang menunjukkan jumlah tindakan kriminal atau berapa banyak *Irregullar Maritime Arrivals* yang terkait dengan tindak kriminal tersebut. Kesulitan pemerintah Australia dalam menghimpun jumlah kejahatan atau tindak kriminal oleh imigran ilegal menyebabkan tidak adanya data statistik resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia.

Beberapa kasus di atas mengantarkan pemerintah Australia untuk memformulasikan suatu kebijakan yang dapat menjaga batas negara mereka dari

¹⁷ Willard Myers. 1994. *The Emerging Threat of Transnational Organized Crime from the East*. Hal. 195

¹⁸ Rebecca Tailby. 2001. *Organised Crime and People Smuggling/Trafficking to Australia*. Canberra: Australia Institute of Criminology.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ G. R. Owens, 2002, *Asset Confiscation: A New South Wales Overview*, *New South Wales Police*, Hal.76

²¹ *Ibid.*,

segala kemungkinan tindak kriminalitas. Batas negara tidak hanya berperan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara tetapi juga mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Keterbatasan kemampuan negara dalam mengelola dan mengawasi semua wilayah perbatasan dan teritorialnya akan berdampak secara signifikan baik secara internal maupun eksternal.²²

Irregular Maritime Arrivals dan People Smuggling

Kasus penyelundupan manusia di berbagai negara termasuk Australia dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, kasus yang terdeteksi adalah bagian gunung es yang berada di atas permukaan laut, sementara kasus-kasus lain yang tidak terdeteksi layaknya bagian gunung es yang berada di permukaan laut dan lebih besar.

Kasus penyelundupan melalui jalur maritim setelah ditemukannya manusia perahu pertama di Australia terjadi pada tahun 1981. Terdapat 146 orang yang mengaku berasal dari Vietnam, dibawa oleh 1 kapal menuju Darwin. Belakangan diketahui bahwa imigran tersebut membayar sejumlah uang kepada pemilik kapal.²³

Insiden penyelundupan juga pernah terjadi di New South Wales dan Queensland menunjukkan oknum penyelundup migran berusaha menjangkau pantai Australia langsung dari rute timur yang mana hingga 1999, area tersebut berada di luar pengawasan Coastwatch. Sebelum tahun 1997, kebanyakan perahu tersebut merupakan perahu kayu kecil yang hanya dapat mengangkut penumpang dalam skala kecil.

Kapal Tiongkok yang mendarat di pulau Thursday pada 13 Juni 1997

merupakan kapal pertama berbahan baja yang membawa penumpang ilegal menuju Australia. Beberapa tahun setelah itu, kapal yang lebih besar dan berat dengan alat navigasi dan teknologi komunikasi yang baik mulai digunakan. Terdapat beberapa bukti bahwa kapal tersebut digunakan untuk berbagai usaha dan terkadang terdapat kompartemen tersembunyi untuk menyembunyikan para imigran ilegal.²⁴ Metode canggih ini digunakan oleh penyelundup manusia untuk membawa orang-orang yang diselundupkan melalui rute timur.²⁵ Rute ini merupakan jalur strategis bagi penyelundup manusia untuk melintasi Australia dengan cepat tanpa terdeteksi menuju kota-kota di pantai timur Australia, selain itu orang yang diselundupkan kemudian dapat dengan mudah menghilang ke dalam komunitas penduduk Australia di Sidney, Brisbane, dan Cairns.²⁶

Penyelundupan manusia di Australia lebih sering terjadi melalui jalur laut, karena keuntungan yang diperoleh oknum penyelundupan manusia akan lebih besar dibandingkan dengan jalur udara yang akan memakan biaya yang lebih tinggi. Selain itu, perbatasan Australia yang terbuka juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah proses penyelundupan. Pemerintah Australia sangat memahami kondisi tersebut, hingga pada tahun 2001, Australia menerapkan kebijakan sekuritisasi untuk memproteksi keamanan dan pertahanan negara dan masyarakatnya.

Irregular Maritime Arrivals (IMA) dan Islamophobia

Salah satu ancaman keamanan non tradisional yang ditimbulkan dari

²² Anak Agung Banyu Perwita, *Isu Perbatasan dan Keamanan Nasional*, dalam *Kompas*, 26 Agustus 2009, hal. 7

²³ *Statistic Section., Op.Cit.,*

²⁴ F David, 2000, *Human Smuggling and Trafficking: An Overview of The Responses at The Federal Level*, Research and Public Policy Series, no.24, Australian Institute and Criminology, Canberra, Hal. 8

²⁵ *Ibid.,*

²⁶ *Ibid.,*

kedatangan *Irregular Maritime Arrivals* (IMA) yang dirasakan oleh Australia adalah terorisme. Terorisme yang dilakukan oleh umat Islam telah menjadi momok tersendiri bagi negara-negara barat, tak terkecuali bagi Australia. Serangkaian teror yang terus menerus terjadi di dunia internasional dan identik dengan umat muslim menimbulkan Islamophobia di kalangan-kalangan negara anti-Islam.

Islamophobia adalah bentuk kefanatikan dan kebencian yang ditargetkan kepada umat muslim, dan lebih umum kepada orang-orang yang dianggap sebagai 'Arab'. Hal ini mendasari asumsi bahwa kedua orang Arab dan Muslim adalah kelompok ras tunggal.²⁷ kata 'Arab' yang dimaksud ialah merujuk pada linguistik yaitu orang-orang yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Kirakira ada sekitar 300 juta orang di 22 negara yang menggunakan bahasa Arab di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.²⁸

Kenyataan yang tak terbantahkan terhadap perkembangan Islamophobia di Australia adalah sejak berkembangnya media terutama televisi, mengingat representasi identitas umat muslim dikembangkan oleh televisi dengan begitu leluasanya²⁹.

Peran media sangatlah penting di era masyarakat modern³⁰. Istilah '*global village*' tidak akan muncul tanpa ada peran dari media. Media memberikan informasi dan membangkitkan kesadaran terhadap segala kejadian yang terjadi di belahan dunia manapun, namun media juga berperan penting dalam membangun dan membentuk pandangan masyarakat dunia terhadap suatu

berita dan menyeleksi serta memberikan penekanan terhadap suatu gejala dengan berbagai cara. Hal ini membuat media berperan penting dalam menyatukan pandangan satu negara dengan negara lain dalam satu kesatuan, bahkan informasi mengenai statistik migrasi, sejarah budaya imigran tersebut serta proses integrasi. Informasi, disinformasi, dan pengaruh yang saling terkoneksi membangun pandangan yang sama dan berakhir pada tindakan yang serupa dalam satu dunia.³¹

Awal mula tahun 1980an, menjadi titik balik stereotip umat Islam di Australia sebagaimana yang terjadi di negara-negara barat lain. Pandangan mengenai umat Islam berpindah dari yang awalnya hanya sebatas sejarah migrasi menjadi ancaman yang berbahaya dan meningkat seiring perkembangan zaman.

Peristiwa yang terjadi di Iran, kasus '*Threat of the North*' yang terjadi di Australia itu sendiri³². Pemerintah Australia menganggap bahwa konflik yang terjadi di negara sebelah utara wilayahnya merupakan ancaman bagi Australia. Berbagai contoh ancaman utara bagi Australia adalah Indonesia dengan konflik GAM di Aceh, konfrontasi Kristen-Islam di Ambon, *Moro National Liberation Front* di Filipina, kerusuhan Islam di Malaysia dan Indonesia, dan penghancuran terhadap gereja-gereja di Jakarta. Efek domino mulai menjadi kekhawatiran Australia.³³ Perkembangan kebijakan pertahanan Australia sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis khususnya di wilayah Asia

²⁷ Rowan Wolf. 2008. *An Introduction of Islam and Anti-Arabism: Illumination Project Curriculum Materials*. Oregon: Portland Community Collage. Hal. 126

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ N Fairclough. 1995. *Media Discourse*. London: Edward Arnold. Hal. 28

³⁰ *Ibid.*,

³¹ J Schultz. 1998. *Reviving the Fourth Estate. Democracy, Accountability and the Media*. Cambridge, Cambridge University Press. Hal. 4

³² Indonesia Today. *Intelejensi Australia Anggap Indonesia sebagai Ancaman*. <http://www.itoday.co.id/politik/diam-diam-intelijen-australia-anggap-indonesia-sebagai-ancaman> diakses pada 10 Januari 2015

³³ *Ibid.*,

Pasifik.³⁴ semua konflik yang telah disebutkan di atas sangat berkaitan dengan Islam.

Konflik GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Indonesia terjadi selama hampir tiga dekade lamanya dari tahun 1976 hingga tahun 2005 terkategori dalam *“Threat of The North”* bagi Australia. Gerakan Aceh Merdeka adalah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia. Selain itu, GAM merupakan konflik yang berkaitan dengan Islam. Secara luas di Aceh, agama Islam yang sangat konservatif lebih dipraktekkan. Hal ini berbeda dengan penerapan Islam yang moderat di sebagian besar wilayah Indonesia lain. Perbedaan budaya dan penerapan agama Islam antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia ini menjadi gambaran sebab konflik yang paling jelas.

Selain pemberontakan yang dipelopori oleh Gerakan Aceh Merdeka, kerusuhan Poso di Indonesia juga menjadi ancaman bagi Australia. Konflik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah merupakan konflik antara Islam dan Kristen. Kerusuhan Poso terbagi menjadi tiga babak, babak pertama terjadi pada 25-29 Desember 1998, Poso II terjadi pada 17-21 April 2000, dan babak terakhir terjadi pada 16 Mei- 15 Juni 2000. Kerusuhan ini tidak luput dari pantauan media baik nasional dan internasional.

Konflik yang melibatkan Islam, juga terjadi di negara Filipina. Konflik Moro diprakarsai oleh kelompok militan Islam yang berpusat di selatan Filipina sejak tahun 1970 hingga sekarang. Diskriminasi pemerintah Filipina terhadap warga muslim menyebabkan pemberontakan oleh warga muslim di Australia. Konflik ini juga menjadi salah satu pertimbangan Australia dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan umat Islam.

³⁴Marsudi, 2006, *Kebijakan Pertahanan Australia dan Respon Negara-negara Asia Timur dan Selandia Baru*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.3.

Tragedi 11 September 2001 merupakan puncak dari Islamophobia yang telah mengakar dari berbagai insiden yang terjadi di dunia bagi negara anti-Islam. Serangan yang dilakukan oleh teroris pada 11 september merupakan bencana kemanusiaan yang mengerikan. Terdapat lima pesawat yang digunakan sebagai senjata penyerangan di Amerika Serikat dalam satu hari. Dua buah pesawat ditabrakkan ke gedung *World Trade Centre* (WTC), satu buah di gedung pentagon, satu buah di gedung pertahanan Amerika Serikat, dan satu lainnya dijatuhkan di dekan bandara Somerset Country, 13 kilometer sebelah timur dari Pennsylvania.³⁵ sebanyak 20 warga Australia menjadi korban dalam tragedi 11 September tersebut. Media massa sangat berpengaruh besar dalam penyebaran berita tersebut, penyebaran berita tersebut dalam sekian detik sampai ke Australia.

Terkait dengan tragedi 11 September 2001, Perdana Menteri Australia memberikan beberapa tanggapan melalui *Sky News* mengenai hal tersebut:³⁶

“This was a completely unprovoked, audacious, outrageously successful terrorist attack. This was a greater violation of the American homeland than Pearl Harbour. The terrorists had destroyed the World Trade Centre. They’d taken out the Pentagon, and if those brave people on that other aircraft that crashed in Pennsylvania had not been so brave, they probably would have taken out either the White House or the Capital building, so it was outrageous. It was audacious. It was successful and it

³⁵ Warsono. 2006. *Serangan World Trade Centre*. Jurnal profesi, Vol. 10.

³⁶Janet Albrechsten, *The Australian*, diakses pada 10 Januari 2015

<<http://www.theaustralian.com.au/news/features/john-howard-on-the-tampa-refugee-issue-and-the-911-attacks-in-washington-and-new-york/story-e6frg6z6-1227183726479>>

was completely unprovoked. That doesn't change the paradigm of the world in which we live. Nothing will"
-John Howard

"Of course I feared, and a lot of us did, that we were going to have a chain reaction. Washington then New York then London then Paris then Tokyo, perhaps Sydney, then Melbourne — who knows? You've got to remember that nobody was prepared for this and naturally fear and imagination runs riot. And I made it very clear Australians would stand should to shoulder with the Americans in the fight against terrorism." –John Howard

Tanggapan yang dilontarkan Perdana Menteri Australia, John Howard terhadap tragedi 11 September tersebut dengan jelas mengindikasikan bahwa pemerintah Australia sangat 'concern' terhadap segala fenomena yang terjadi di berbagai negara. Tragedi 11 September bukan hanya tragedi nasional yang menimpa Amerika Serikat, namun juga dipandang sebagai tragedi internasional. Sehingga Australia juga mengambil inisiatif untuk merumuskan kebijakan yang mampu menangkal berbagai kemungkinan konflik atau tragedi di Australia.

Kedatangan *Irregular Maritime Arrivals* di Australia pada beberapa tahun terakhir hingga tragedi Tampa terjadi menunjukkan bahwa mayoritas IMA berasal dari Afghanistan, Iran, Iraq, dan Sri Lanka yang terkategori sebagai Islam dan bangsa Arab. Ini adalah satu alasan utama Perdana Menteri Australia, John Howard mengimplementasikan kebijakan sekuritisasi terhadap *Irregular Maritime Arrivals*. Pada

tanggal 27 September 2001³⁷, Australia meresmikan kebijakan sekuritisasi yang diberi nama *Pacific Solution*, yaitu hanya 16 hari setelah tragedi 11 september yang terjadi di Amerika Serikat.

Tragedi Bom Bali I dan II yang terjadi di Indonesia menguatkan alasan pemerintah Australia dalam melanggengkan kebijakan sekuritisasi yang telah diimplementasikan pada 27 September 2001. Tragedi Bom Bali I yang terjadi di Indonesia pada 12 Oktober 2002, menyebabkan 202 orang tewas dalam ledakan bom. Warga Australia menjadi korban utama dalam ledakan bom tersebut, yaitu sebanyak 88 warga Australia tewas. Tragedi Bom Bali II terjadi pada tahun 2005 dan 4 orang warga Australia kembali menjadi korban. Serangkaian tragedi yang terjadi dan menjadikan Australia sebagai salah satu korban menguatkan pemerintah Australia dalam menjalankan kebijakannya terkait isu terorisme dan islamophobia melalui kedatangan *Irregular Maritime Arrivals*.

III. Simpulan

Australia telah menerapkan berbagai kebijakan menyangkut pencari suaka yang menuju Australia menggunakan perahu selama lebih dari 10 tahun. Pemerintah Australia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk menghalangi kedatangan *Irregular Maritime Arrivals*. Kebijakan sekuritisasi diimplementasikan Australia pada tahun 2001 yang dikenal dengan nama *Pacific Solution*.

Simpulan dari penelitian adalah Australia mengimplementasikan kebijakan *Pacific Solution* terhadap *Irregular Maritime Arrivals* karena Australia khawatir keamanan negaranya akan terancam. Adapun kekhawatiran Australia tersebut

³⁷ Australian Human Right Commision. *Migration Law* <https://www.humanrights.gov.au/human-rights-law-bulletin-volume-2> diakses pada 10 Januari 2015

berupa persepsi yang negatif terhadap *Irregullar Maritime Arrivals* seperti anggapan bahwa *Irregullar Maritime Arrivals* adalah imigran ilegal yang identik dengan kriminalitas, kekhawatiran Australia akan adanya penyelundupan manusia, dan yang terakhir adalah Islamophobia yang dirasakan oleh masyarakat Australia.

Referensi

- Australian Maritime Digest. 2007. *Four New Customs Vessels*, Vol. 5 no. 157.
- _____. 2007. *Stronger Aerial Surveillance in Northern Australia*. Vol. 5 no. 155.
- Bateman, Sam. *Securing Australia's Maritime Approaches*. Juournal Security Challenges, Vol.3 Num.3.
- Bergin, Anthony and Sam Bateman. 2005. *Future unknown: The terrorist threat to Australian maritime security*. Canberra: Australian Strategic Policy Institute.
- Brooke, Michael. 2006. *Huons reactivated*, Navy News: vol. 49, no. 9. <<http://www.defence.gov.au/news/navynews/editions/4909/topstories/story10.htm>> diakses pada 1 November 2014
- David, F. 2000. *Human Smuggling and Trafficking: An Overview of The Responses at The Federal Level, Research and Public Policy Series*, no.24, Australian Institite and Criminology, Canberra.
- Gillard, Julia dan Bowen, Chris. *Transcript of joint press conference*. Parliament Australia. terdapat dalam <<http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22media%2Fpressrel%2F1162009%22>>, diakses pada 25 Mei 2014.
- Marsudi. 2006. *Kebijakan Pertahanan Australia dan Respon Negara-negara Asia Timur dan Selandia Baru*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.3.
- McInerny, T. 2000. *People Smuggling: an Inhuman Trade*. Platypus: Vol.68.
- Nurdin, M. Amin. *State Conflict Management in Multiculturalism: Lesson from Australian Muslim*. Diakses dari <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-usnuluddin/article/download/1014/904>> pada 8 Januari 2015
- Phillips, Janet. 2012. Parliament of Australia, Department of Parliamentary Service. *The Pacific Solutions Revisited: a Stastistical guide to the Asylum Seekers Caseloads in Nauru and Manus Island*
- Phillips, Jannet and Harriet Spinks. 2013. *Boat arrivals in Australia since 1976*. Parliament of Australia, Departement of Parliamentary Service. diakses dari <[http://www.aph.gov.au/About Parliament/Parliamentary Departments/Parliamentary Library/pubs/BN/2011-2012/BoatArrivals](http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2011-2012/BoatArrivals)>
- Warsono. 2006. Serangan World Trade Centre. Jurnal profesi, Vol. 10.
- Wolf, Rowan. 2008. *An Introduction of Islam and Anti-Arabism: Illumination Project Curriculum Materials*. Oregon: Portland Community Collage.

Buku

- BN, Marbun. 1996. *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bricksmann et al. 2006. *Human Right over Board: Seeking Asylum in Australia*. Victoria: Scribe Publication Pty Ltd.

- Budiardjo, Miriam. 1997. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burchill, Scott dan Andrew Linklater. 1996. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Buzan, Barry. *People, States and Fear: An Agenda For International Security Studies in the Post-Cold War Era. 1st edition 1981, 2nd Edition. Hertfordshire Wheatsheaf, 1991 and 2008 with a new preface from an author*. Dalam Marianne stone. 2009. *Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis*. New York: Columbia University.
- Buzan, Barry, Ole Waever & Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publisher.
- Ciuta, Felix, 2009. *Security and the Problem of the context: a hermeneutical critique of securitization theory*, Review of International Studies.
- Demuth, Andreas. 2000. *Some Conceptual Thought of Migration dalam Theoretical and Methodological Issues in Migration Research*. Pennsylvania: Assghate Publishing.
- Enderby. 2001. *Immigrants: Case for the third umpire*. The Australian, 30 Agustus 2006.
- Fairclough, N. 1995. *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Griffiths, Marthin dan Terry O'Callaghan. 2002. *International Relation: The Key Concepts*. London and New York: Routledge.
- Holsti, K.J. 1995. *International Politics: A Framework For Analysis*, New York: Prentice Hall International Inc.
- Jones, Anthony H dan Abdullah Saeed. 1984. *Muslim in Australia: The Building of Community*. Melbourne: Monash University Press.
- Kevin, Tony. 2004. *A Certain Maritime Incident – The Sinking of SIEV-X*, Carlton North: Scribe Publications.
- Lestari, Lily. 2010. *Motivasi pemerintahan Barack Obama menutup penjara Guantanamo*. Pekanbaru.
- Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3ES.
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya.
- Myers, Willard. 1994. *The Emerging Threat of Transnational Organized Crime from the East*.
- Owens, G.R. 2002. *Asset Confiscation: A New South Wales Overview*, New South Wales Police.
- Perwita, Anak Agung Bayu. 2009. *Isu Perbatasan dan Keamanan Nasional*, dalam Kompas, 26 Agustus 2009.
- Schultz, J. 1998. *Reviving the Fourth Estate. Democracy, Accountability and the Media*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Scott D. Watson. 2009. *Securitization of Humanitarian Migration: Digging Moats and Sinking Boats*. New York: Routledge
- Steans, Jill dan Lloyd Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tailby, Rebecca. 2001. *Organised Crime and People Smuggling/Trafficking to Australia*. Canberra: Australia Institute of Criminology.

W.T.R, Fox, 1959. *Theoretical Aspects of International Relations*. University of Notre dame.

Dokumen Resmi

Australian Government, Department of Immigration and Border Protection. Statistic Section. Dikses dari <<http://www.immi.gov.au/media/publications/statistics/federation/timeline2.pdf>> pada 7 Januari 2015

Australian Government-Departement of Foreign Affairs and Trade. Pada <<https://www.dfat.gov.au/aif/publications/lib/pdf/Pengantar.pdf>> diakses pada 27 Oktober 2014

_____. *MOU on Asylum Seeker Signed With Nauru*. Dalam <http://www.dfat.gov.au/media/releases/foreign/2001/fa177_01.html> diakses pada 11 Januari 2015

Australian Human Right Commision. Migration Law <<https://www.humanrights.gov.au/human-rights-law-bulletin-volume-2>> diakses pada 10 Januari 2015

Department Immigration and Citizenship. *Immigration detention statistics summary*. terdapat dalam <<http://www.immi.gov.au/managing-australiasborders/detention/facilities/about/>> diakses pada 9 September 2014.

_____. 2000. *Refused Immigration Clearance Report, December 1999, Unauthorised Arrivals Section*, Canberra. Diakses pada September 2014 dalam <<http://www.immi.gov.au/About/Pages/ima/info.aspx>>

_____. Annual Report 2001-2002. *Offshore Asylum Seeker Management*. Diakses dalam

<<http://www.immi.gov.au/about/reports/annual/2001-02/report38.htm>> pada 12 Januari 2015

Human Right and Equal Opportunity Commision (HREOC). 1998. *Who've Come Across the Seas: Detention of Unauthorised Arrivals in Australia*. Canberra: Australian Government Publising Service.

Liberal Party. *Operation Sovereign Borders*. <<http://www.liberal.org.au/latest-news/2013/07/26/operation-sovereign-borders>> diakses pada 27 Oktober 2014

Refugee Council. *Timeline of Major Events in the History of Australia's Refugee and Humanitarian Program*. Dalam <<http://www.refugeecouncil.org.au/factsheets/australias-refugee-and-humanitarian-program/timeline/>> diakses pada 10 Januari 2015

UNHCR-The UN Refugee Agency. *Tentang UNHCR*. <<http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr>> diakses pada 10 Maret 2014

UNODC-United Nation Office on Drug and Crime. <http://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTA-EAPacific/TOCTA_EAP_c04.pdf> diakses pada 26 Oktober 2014

Situs Web

Albrechsten, Janet. The Australian, diakses pada 10 Januari 2015 <<http://www.theaustralian.com.au/news/features/john-howard-on-the-tampa-refugee-issue-and-the-911-attacks-in-washington-and-new-york/story-e6frg6z6-1227183726479>>

BBC News, Australia: *Why boat people risk it all*, 4 September 2013

- <<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23933103>> diakses pada 11 Oktober 2014
- Brisbane times.
<<http://www.brisbanetimes.com.au/national/pm-back-to-pacific-solution-20120813-24571.html>> diakses pada 27 Oktober 2014
- Britannica. *Vietnam War*. Diakses dari <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/628478/Vietnam-War>> pada tanggal 7 Januari 2015
- Dodd, Mark. *Navy struggles to fix fault in patrol boats*. The Australian, 5 Februari 2007, <<http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21171009-601,00.html>> diakses pada 1 November 2014
- Grattan, Michelle. *Bowen policy to deter boats laden with risk*. <<http://www.theage.com.au/opinion/politics/bowen-policy-to-deter-boats-laden-with-risks-20121122-29stn.html>>, diakses pada 22 Mei 2014.
- Hanson, Fergus. *Australia and the World: Public Opinion and Foreign Policy*, <http://lowyinstitute.cachefly.net/files/pubfiles/Lowy_Poll_2001_WEB.pdf> diakses pada 5 Januari 2015
- Indonesia Today. *Intelejensi Australia Anggap Indonesia sebagai Ancaman*. <<http://www.itoday.co.id/politik/diam-diam-intelijen-australia-anggap-indonesia-sebagai-ancaman>> diakses pada 10 Januari 2015
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. *Australia Ambil Tindakan Tegas terhadap Penyelundup Manusia dan Menghentikan Pemrosesan Klaim* oleh Beberapa Pencari Suaka. Terdapat dalam <http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM10_033.html> diakses pada 27 Oktober 2014
- Pacific Media Centre. *Australia's Pacific Solution for Asylum Seeker-a Timeline*. Diakses pada 10 Januari 2015 dalam <<http://www.pmc.aut.ac.nz/articles/australias-pacific-solution-asylum-seekers-timeline>>
- The Australian. *Julia Gillard's speech to the Lowy Institute on Labor's new asylum-seeker policy for Australia*. 6 Juli 2010. <<http://www.theaustralian.com.au/politics/juliagillards-speech-to-the-lowy-institute-on-labors-new-asylum-seeker-policy-foraustralia/story-e6frgczf-1225888445622>> diakses pada 10 Maret 2014
- World Savvy Monitor. "Migration: Why?". terdapat dalam <http://worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=430&Itemid=810> emid=810, diakses pada 8 Maret 2014
- Wood, Alexander J. *The Pacific Solution: Refugees Unwelcome in Australia*, terdapat dalam <<http://www.wcl.american.edu/hrbrief/09/3wood.pdf>> diakses pada 10 Januari 2015